

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2014)
- Andi Hamzah (I), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 7
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994)
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994)
- Bernard L, *Teori Hukum*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2013)
- Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20xxx)
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958)

- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1990)
- Indroharto, *Asas-Adas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019)
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Kistian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2016)
- Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 19
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008)
- Muladi, Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1992)

Prajudi Atmasudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1981, cetakan ke-4)

R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005

Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Jurnal

Risma Hafid, “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”, *Skripsi Universitas Hasanudin Makassar* (2016)

Philipus M. Hadjon, “tentang wewenang”, *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, No. 5 dan 6 Tahun XII, September - Desember, (1997)

I Made Arya Utama, *buku ajar hukum pidana*, (Denpasari: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2007)

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000)

Marwan Effendy. “Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi”. Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi. Mendalo, Jambi. 16 April 2011.

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Laksbang Mediatama, Palangkaraya)

Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan.....*, *Op. Cit.*, hal. 4-5, lihat pula H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *op.cit.*

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb

Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/Pid.Sus-TPK/PT AMB

Website/Internet

Indonesian Corruption Watch, “Dana Desa Rentan Disalahgunakan”.

<https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan> diakses pada 30 November 2022

Vizka Azkiya Dihni, “ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran

Dana Desa”. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20menemukan,bahkan%20cenderung%20meningkat%20sejak%202015](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20menemukan,bahkan%20cenderung%20meningkat%20sejak%202015) diakses pada

20 September 2022

Referensi lain

Universitas Pelita Harapan, *Standart Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)